

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yuridis sosiologis dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fasilitas kesehatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum yang tersedia Perlindungan hukum terhadap PPK pada prinsipnya telah tersedia melalui pengaturan kewenangan, prosedur pengadaan, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan internal. Perlindungan tersebut bersifat:
 - a. Preventif, melalui kepastian norma, standar operasional prosedur, dan mekanisme pengendalian internal
 - b. Represif, melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan administratif, dan penggunaan dokumentasi kontrak sebagai alat pembuktian kepatuhan prosedural.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah Kendala Kompetensi Teknis Konstruksi sehingga tidak memiliki keahlian teknik sipil/arsitektur, kurang memahami gambar teknis (shop drawing, RAB detail, spesifikasi teknis), Kesulitan menilai, Kompleksitas Regulasi Pengadaan dan Jasa Konstruksi

3. Upaya yang dilakukan sebagai konsekwensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Perlindungan hukum terhadap PPK bukan hanya bersifat normatif, tetapi harus diikuti dengan upaya konkret sebagai konsekuensi dari tanggung jawab jabatan. Upaya ini bertujuan meminimalkan risiko administratif, perdata, maupun pidana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan:

- a. Upaya Preventif (Pencegahan Risiko Hukum)
- b. Upaya Represif (Jika Terjadi Permasalahan Hukum)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar penempatan PPK sesuai kompetensi teknis Pemerintah Daerah di Kota Payakumbuh sebaiknya mempertimbangkan kesesuaian latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis dalam penunjukan PPK, khususnya untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki kompleksitas tinggi.
2. Agar Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah perlu lebih aktif melakukan pendampingan preventif, bukan hanya pengawasan represif, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak tahap perencanaan.

3. Agar Penyediaan Bantuan dan Perlindungan Hukum Institusional Pemerintah daerah perlu menetapkan mekanisme baku pemberian bantuan hukum bagi PPK yang menghadapi permasalahan hukum sepanjang bertindak dengan itikad baik dan sesuai prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang, Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Radja Grafindo Persada
- Soekonto, Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Budihardjo, Hardjowiyono & Hayie, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
- Sofyan, Effendi & Aulia, Utami Putri. *Buku Ajar Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa* : Unsri Press
- Marzuqi, Yahya & Endah, Fitri Susanti. *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres* diedarkan lewat dokumen pemerintah
- Simamora & Y. Sogar, *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*
- Dodi Nandika, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*
- Will Hughes, Ronan Champion & John Murdoch, *Construction Contracts: Law and Management*
- Smith, Currie & Hancock, *Common Sense Construction Law*
- S. Arifin, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (dan kolega)*
- Michael Flynn, Kirk Buffington & Richard Pennington, *Legal Aspects of Public Procurement (3rd Edition)*
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. 2019. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*.
- Hardiansyah, D. 2020. *Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: PT ABC.
- Nugroho, A. 2019. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit UM.
- Rahman, F. 2020. *Tantangan Pelaksanaan PPK*. Bandung: CV DEF.
- World Bank. 2020. *Governance and Public Sector Accountability*

Fitriani, R. 2022. *Peran Tenaga Kesehatan dalam Pengelolaan Anggaran Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Ilmu Kesehatan.

Hamzah, A. 2018. *Kompetensi Tenaga Kesehatan dan Pelayanan*. Bandung: Penerbit Edukasi.

Nurchahyo, E. & Indriyani, S. 2021. *Integrasi Peran Klinis dan Administratif*

World Health Organization (WHO). 2016. *Global Strategy on Human Resources for Health*. Geneva: WHO.

Fitriani, R. 2022. *Peran Tenaga Kesehatan dalam Pengelolaan Anggaran dan Pekerjaan Konstruksi Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Ilmu Kesehatan.

Hamzah, A. 2018. *Kompetensi Tenaga Kesehatan dan Pelayanan*. Bandung: Penerbit Edukasi.

World Health Organization (WHO). 2016. *Global Strategy on Human Resources for Health*. Geneva: WHO.

Depkes RI 2018. *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes

Senge, P. M. 1990. *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*. Doubleday.

Thompson, J. D. 1967. *Organizations in Action*. McGraw-Hill.

World Bank 1994. *Governance and Development*. World Bank Publication.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Teknis Bangunan dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior*. Pearson.

C. Sumber Lain

Metasari, Yelly. 2022, Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 1.

Astuti, Yana & Samian & Hardjomuljadi, Sarwono. Strengthening The Role and Legal Protection of Commitment Making Officials in Government Goods/Services Procurement, *Interdisciplinary Social Studies Journal*.

Istiqballia, Naony Fenti & dkk. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*.

Elsha Ersanda & dkk. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia oleh PPK , *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

Fauzan Alfarissi Dalimunthe & Tri Reni Novita. Civil Liability of Officials Making Commitments in the Procurement of Goods/Services, *Jurnal Meta Hukum*.

Sonny Wirawan & dkk. Law Enforcement for Commitment Making Officials Who Make Overpayments Without Mens Rea Fox Justi : *Jurnal Ilmu Hukum*.

Heni Marlina. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Doctrinal Journal*.

Fahmi Anugrah Putra & Widya Romasindah Aidy. Pertanggungjawaban Pidana PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan Modus Jual Beli Jabatan ASN, *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*.

Sri Poniayah & Ramlani Lina Sinaulan & Farhana. Tinjauan Hukum terhadap Peran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*.

Julianda B. Manalu. Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.

- Kurniawan, T. 2020. “Peran PPK dalam Efektivitas Pengadaan Pemerintah”, *Jurnal Manajemen Publik*, 5(2), 45-58.
- LKPP. 2021. Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: LKPP.
- Mulyadi, S. 2019. “Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Publik”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 12(1), 120-136.
- Putra, B., & Wijaya, E. 2022. “Analisis Kompetensi PPK di Instansi XYZ”, *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 15-29.
- Siregar, R. 2021. “Evaluasi Kinerja PPK pada Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Publik*, 9(3), 78-95.
- Tenaga Kesehatan sebagai PPK”, *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 85–102.
- Saputra, F. & Wibowo, A. 2020. “Tantangan PPK di Fasilitas Kesehatan di Daerah Terpencil”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 33–47.
- Nurcahyo, E. & Indriyani, S. 2021. “Integrasi Peran Klinis dan Administratif Tenaga Kesehatan sebagai PPK”, *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 85–102.
- Saputra, F. & Wibowo, A. 2020. “Tantangan PPK di Fasilitas Kesehatan di Daerah Terpencil”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 33–47.
- Nurcahyo, E., & Indriyani, S. 2021. “Peran Organisasi Pemerintah dalam Proyek Konstruksi Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, 17(3), 215–230.
- Saputra, F., & Wibowo, A. 2020. “Tantangan Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Lembaga Publik”, *Jurnal Manajemen Proyek*, 8(2), 99–111.